# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

 Peneliti menggunakan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, penelitian yang digunakan tentunya yang berkaitan dengan masalah konsep diri dan kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh para wanita tuna susila. Dibawah ini beberapa penelitian yang diambil peneliti untuk melengkapi penelitian yang berkaitan dengan konsep diri pada wanita tuna susila, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Judul Jurnal | Author | Hasil Penelitian | DOI/ ISSN/ LINK |
| 1  | Konsep diri pada wanita pekerja seksual yang mengalami penyakit menular. | Ade Septia Lumban Gaol, Hernawilly, Gustop Amatiria | Wanita tuna susila khususnya yang memiliki penyakit menular seksual memiliki gambaran diri negatif dikarenakan mereka merasakan organ vitalnya mengalami perubahan bentuk dan penampilan. Selain itu harga diri mereka cenderung negatif karena menganggap dirinya tidak mampu memenuhi harapan-harapan yang diinginkan dengan keterbatasan fisik. Namun untuk ideal diri, peran diri dan identitas diri mereka cukup positif karena untuk ideal diri mereka realistis, peran diri mereka puas dan untuk identitas diri mereka memiliki kesadaran tentang dirinya dengan baik dan jelas. | DOI: http://dx.doi.org/10.26630/jkep.v10i2.255 |
| 2 | Upaya rehabilitasi eks pekerja seksKomersial (psk) di panti sosial karya wanita (pskw) andam dewi solok | Ahmad Saefulloh & Nofriza | Rehabilitasi pada eks wanita tuna susila dapat dilaksanakan dengan du acara yaitu upaya preventif dan upaya rehabilitative. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan melalui berbagai kegiatan dan untuk upaya rehabilitatif diadakannya kegiatan keagamaan, keterampilan dan kerajinan tangan serta pendampingan jangka Panjang. | DOI: https://doi.org/10.24256/pal.v3i2.359 |
| 3 | Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia | Binahayati Rusyidi & Nunung Nurwati | Kegiatan pelacuran dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi beragai pihak seperti PSK itu sendiri, Ketahanan keluarga dan masyarkat. Pelacuran terjadi oleh beberapa faktor penyebab oleh karena itu dalam menangani masalah ini harus mempertimbangkan faktor penyebab tersebut. Dalam melalukan proses rehabilitasi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyedia layanan dan pemberdayaan harus dilakukan agar rehabilitasi tidak terjadi dalam satu arah. | DOI:https://doi.org/10.24198/jppm.v5i3.20579 |
| 4 | Wanita Tuna Susila di Sumatera Barat dan Pembinaannya (Studi Kasus Panti Andam Dewi Solok) | Doni Nofra & Inggria Kharisma | Faktor utama yang menjadikan para perempuan menjadi PSK yaitu karena masalah ekonomi. Para wanita tuna susila akan mendapatkan pembinaan yaitu seperti bimbingan fisik, mental, sosial kemasyarakatan dan bimbingan keterampilan. Pembinaan ini maksudkan agar meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan pelayanan yang diberikan. | DOI:http://dx.doi.org/10.30983/it.v3i1.961 |
| 5 | Konsep diri orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang menerima label negatif dan diskriminasi dari lingkungan sosial | Hasna Sarikusuma & Nur Hasanah | Konsep diri yang terbentuk pada ODHA yaitu oleh hasil interaksi sosial dengan lingkungannya seperti keluarga, teman dan orang lain. Para ODHA sering memiliki pandangan negatif terhadap diri sendiri dan merasa lingkungan sekitar menolak keberadaannya karena lingkungan mereka seringkali memberikan label negatif seperti mengatakan mayat hidup, pembawa penyakit menular, penyakit kutukan dan aib. Hal itu menyebabkan mereka memiliki sikap putus asa, depresi, perasaan tertekan dan memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Diskriminasi menjadi masalah selanjutnya mereka mendapatkan diskriminasi baik dari orang terdekat seperti keluarga dan masyarakat sekitar. Label negative dan diskriminasi yang mereka dapatkan akhirnya menimbulkan konsep diri yang negatif.  | DOI:10.32734/psikologia.v7i1.2533 |
| 6 | Menakar Efektivitas Dakwah di LokalisasiPasar Kembang Yogyakarta dengan Pendekatan Model Matematika | Maryono & Muhammad Wakhid Musthofa | Strategi dakwah yang dilakukan masih belum efektif dalam mengurangi jumalah PSK. Walaupun sudah dilakukan berbagai jenis dakwah namun hasilnya masih belum sepenuhnya berhasil. Seperti saat sedang dilakukan kegiatan dakwah atau kegiatan keagamaan lainnya seringkali para wanita tuna susila pulang dan pergi dari tempat kegiatan dikarenakan ada klien yang Sudha menunggu. | DOI:https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss1.art8 |
| 7 | Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab | Mia Amalia | Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau etika kesusilaan dan kegiatan yang illegal dimana bersifat melawan hukum. kebijakan yang dapat diterapkan dalam menangani masalah PSK yaitu kebijakan Abolisi merupakan suatu kebijakan penghapusan prostitusi di muka bumi dengan cara menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara komprehensif yaitu dengan penegakan hukum dan pemberitaan di media massa atau online bagi pelaku prostitusi. Untuk pertanggungjawaban secara pidana pihak yang dapat dipidanakan yaitu seperti calo, mucikari dan PSK serta pelanggannya. | DOI:https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.35 |
| 8 | Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Efikasi Diri Wanita Tuna Susila Mengikuti Rehabilitasi Sosial Di Panti Sosial Pelayanan Wanita Wanodyatama Surakarta | Mila Puspita Arum & Triyono | Dalam menjalani rehabilitasi ada hubungan yang erat atau signifikan antara dukungan sosial dan efikasi pada wanita tuna susila. Efikasi diri pada wanita tuna susila dapat dicari dengan adanya dukungan sosial yang berasal dari lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan agar para wanita tuna susila dapat sepenuhnya terentaskan atau lepas dari dunia prostitusi. | DOI:http://dx.doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i2.984 |
| 9 | Pekerja Seks Komersial (Psk)Di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah | Siti Munawaroh | Permasalahan prostitusi atau PSK sudah terjadi sejak dulu yang hingga saat ini kegiatannya semakin marak terjadi. Dari segi agama maupun adat istiadat kegiata prostitusi merupakan hal yang tidak baik namun bagi pelaku atau wanita tuna susila itu sendiri kegiatan yang mereka lakukan adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan hidupnya dan keluarganya. Banyak faktor penyabab seperti kekurangan ekonomi dan rendahnya pendidikan. Kurangnya kontrol sosial dan aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menagani wanita tuna susila menjadikan tempat mangkal PSK belum dapat dimusnahkan sejak dahulu. | DOI:10.21831/dimensia.v4i2.3433 |
| 10 | Pertobatan Wanita Pekerja SeksKomersial (Psk) Di Majelis Asy-Syifa: Studi Deskriptif Bimbingan Sosio-Spiritual | Titik Rahayu | Kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh para wanita tuna susila merupakan bentuk penyimpangan syariat agama. Oleh karena itu sudah seharusnya para wanita tuna susila melalukan pertaubatan seperti di mengikuti pengajian, walaupun pada saat pelaksanaan masih tetap menjalani profesi sebagai PSK. Dengan diberikannya pengetahuan dan pendampingn akan memberikan dampak seperti memicu kesadaran dari dalam diri sehingga mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Setelah diberikan pengetahuan tentang agama lewat pengajian dan kesadaran diri telah muncul maka selanjutnya mereka akan melalukan tobat dalam tindakan nyata yaitu dengan berhenti sebagai wanita tuna susila. | DOI:10.22515/balagh.v3i1.1091 |
| 11 | Implementasi Pelatihan Lifeskill untuk Meningkatkan Motivasi Berwirausaha Wanita Tuna Susila di Panti Sosial Karya Budi RiniWahyu | Wahyu Winandi & Muhammad Arief Rizka | Program pelatihan *lifeskill* harus direncanakan dengan baik seperti mulai dari perencanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut. Pelatihan yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki setiap individu. Agar keterampilan yang dimiliki dapat terus digunakan harus didukung oleh sarana dan prasarana. Seperti dalam pelatihan tata boga pengelola panti atau pihak yang berkaitan memberikan modal bantuan usaha berupa alat-alat dapu atau fasilitas memasak yang berfungsi untuk media pendukung agar mereka dapat serius terjun ke dunia wirausaha dan meninggalkan pekerjaannya sebagai wanita tuna susila. | DOI:https://doi.org/10.33394/jk.v4i1.908 |
| 12 | Kebermaknaan Hidup Pada Pekerja Seks Komersil (Psk) | Weillon Chaidir & Josetta Maria R. Tuapattinaja | Adanya peran *social support* dan kehadiran *figure* atau model dalam kehidupan wanita tuna susila dapat menumbuhkan semangat dalam melanjutkan hidupnya. Karena mereka dapat belajar melalui *vicarious learning* dari orang-orang terdekatnya untuk melawati penderitaanya sehingga dapat menerima kesadaran diri sepenuhnya. Aspek *spiritualism* juga merupakan aspek penting dalam menghadapi tantangan kehidupan, dengan menerima keadaan diri dan mulai melihat keadaan di luar dirinya akan lebih mudah untuk menerima kehadiran Tuhan dalam melanjutkan kehidupannya. | DOI:10.32734/psikologia.v13i3.2275 |
| 13 | Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (Brskw) Palimanan Kabupaten Cirebon | Widya Suci Ramadhani, Sri Sulastri, H. Soni Akhmad Nurhaqim | Prostitusi atau pelacuran merupakan masalah sosial yang kompleks adapun faktor penyebabnya seperti faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan dan tidak memiliki keahlian. Salah satu upaya dalam menangani masalah ini yaitu dengan rehabilitasi, dimana rehabilitasi ini bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian wanita tuna susila dan bertujuan untuk memberikan keterampilan atau keahlian dengan itu maka para wanita tuna susila tidak akan kembali ke dunia prostitusi. Dalam proses rehabilitasi dibutuhkan juga peran dari pekerja sosial karena kegiatan ini merupakan salah satu ranah prakti pekerjaan sosial. | DOI:10.24198/jppm.v4i2.14292 |
| 14 | Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda MuhammadiyahDalam Pencegahan Prostitusi Terselubung di Kecamatan Medan Belawan | Fitri Yani & Muhammad Ihsan | Prostitusi terjadi selain karena kurangnya ekonomi terjadi karena kurangnya pemahaman nilai-nilai agama dan nilai moral serta etika masyarakat. Untuk menangani masalah prostitusi yang terjadi pemuda Muhammadiyah melakukan kegiatan penyuluhan, pengajian dan advokasi serta sosialisasi dan motivasi, pencerahan dari sisi agama. Hal ini dilakukan agar mecegah masyarakat melakukan tindakan prostitusi yang semakin marak hingga dijadikannya tempat kos-kosan untuk kegiatan terlarang ini. | DOI:https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.4163 |
| 15 | PSK dan Tekanan Sosial Pasca Penutupan Gang Dolly Surabaya | Hera Wahyuni | Para PSK lebih nyaman saat berada di tempat lokalisasi karena mereka merasa mendapat dukungan dari lingkungan kerjanya tersebut. Para PSK mengetahui norma yang berlaku dan sadar pekerjaannya melanggar norma tersebut, mereka tetap menjadi pekerja seksual dikarenakan mereka belum bisa menerapkan norma tersebut dalam kehidupannya. Oleh karena itu dibutuhkan bekal pendidikan kecakapan hidup. | DOI:https://doi.og/10.21107/personifikasi.v5i1.6567 |
| 16 | Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga Dengan Psychological Well-Being Pada Pekerja Seks Komersial Di Panti Rehabilitasi | Welhelmina Maria Yuniaputry Hailitik,Maggareta Erna Setianingrum | Kesejahteraan psikologis pada PSK dapat dicapai dengan adanya dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan masyarakat. Dukungan yang mereka dapatkan dapat berfungsi untuk mengurangi stress yang mereka rasakan dan permasalahan lainnya yang mereka hadapi.  | DOI:https://doi.og/10.31001/j.psi.v11i2.543 |
| 17 | Gaya Hidup Remaja Pekerja Seks Komersial Di Kabupaten Pinrang | Armita Septiana Darwis, Firdaus W Suhaeb dan Mauliadi Ramli | Faktor penyebab para remaja menjadi pekerja seksual dikarenakan lingkungan pertemanan, kekurangan ekonomi dan broken home. Remaja mempunyai gaya yang berbeda untuk memenuhi keinginnannya, sepereti dalam kehidupan remaja ada yang disebut dengan hedonisme yang dimana tujuannya untuk mengejar kesenangan, kenikmatan dan mengutamakan penampilan luar. Yang kedua remaja memiliki gaya hidup kebarat-baratan dan yang terakhir meniru gaya hidup di media sosial. | DOI:https://doi.og/10.26858/pr.v2i1.22899 |
| 18 | Konsep diri pada wanita pekerja seksual yang mengalami penyakit menular seksual | Ade Septia Lumban Gaol, Hernawilly dan Gustop Amatiria | Gambaran diri pada wanita tuna susila yang mengalami penyakit menular memiliki gambaran diri negatif, ideal diri mereka cenderung realistis, untuk harga diri mereka memiliki harga diri yang cenderung rendah, peran diri mereka dapat dikatakan puas, untuk identitas diri mereka cenderung jelas dan konsep diri mereka bersifat maladaptif. | DOI:http://dx.doi.org/10.26630/jkp.v10i2.255 |
| 19 | Pengalaman Menjadi *Single Mother* Pada Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Resosialisasi Sunan Kuning Semarang | Anisa Nur Safira dan Amalia Rahmandani | Penyebab menjadi pekerja seksual dikarenakan mereka menjadi tulang punggung keluarga setelah bercerai, hal tersebut mengakibatkan peran seorang ibu menjadi terhambat karena para wanita tuna susila harus tinggal di lingkungan resosialisasi. Walaupun terbatas oleh jarak dan waktu mereka berupaya untuk terus terlibat dalam pengasuhan anak-anaknya.  | DOI:https://doi.og/10.14710/empati.2018.23483 |
| 20 | Kebermaknaan Hidup Pada Pekerja Seks Komersil (Psk) | Weillon Chaidir dan Josetta Maria R. Tuapattinaja | Adanya peran *social support*, kehadiran *figure* atau panutan dan juga *spiritualism* dapat memberikan peran penting dalam menghadapi kehidupan. Hal ini dapat menumbuhkan rasa semangat untuk pekerja seksual dalam melanjutkan kehidupannya. | DOI:10.32734/psikologia.v13i3.2275 |
| 21 | Pertaubatan Wanita Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Majelis Asy-Syifa (Studi Bimbingan Sosio-Spiritual) | Titik Rahayu | Proses pertaubatan yang dilakukan ada beberapa tahap yang pertama wanita tuna susila mengikuti pengajian yang kedua yang diberikannya pengetahuan dan kesadaran untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri dan ketiga melakukan tindakan nyata seperti keluar dari dunia prostitusi. | DOI:10.22515/balagh.v3i1.101 |
| 22 | Orientasi masa depan pada remaja yang bekerja sebagai pekerja seks komersial (Psk) | Nur Haya | Setiap wanita tuna susila memiliki gambaran orientasi masa depan yang berbeda. Ada yang memiliki kenginginan dalam bidang pendidikan, pekerjaan hingga pernikahan. Tergantung bagaimana setiap individu memiliki harapan dalam bagaimana mereka kedepannya akan melakukan kehidupan seperti apa. | DOI:http://dx.doiorg/10.30872/psikoborneo.v5i1.4335 |
| 23 | Efektivitas Pelatihan Penerimaan Diri Dalam Meningkatkan Penerimaan Diri Psk Di Ppskw Mattiro Deceng | Aprilia Islamiyanti Kusumaningrum, Eva Meizara Puspita Dewi dan Muhammad Nur Hidayat Nurdin | Setelah melakukan pelatihan penerimaan diri para wanita tuna susila mengalami peningkatan diri. Pelatihan penerimaan diri bertujuan agar para wanita tuna susila merasa lebih tenang dan rileks sehingga dapat meresakan emosi yang positif, beban dan pikiran yang negatif berkurang hingga mereka dapat berpikir lebih positif. | DOI:10.31293/mv.v4i1.5400 |
| 24 | Konsep Diri Pada Pekerja Seks Komersial | Drs. D.P. Budi Susetyo, Msi dan Drs. Y. Sudiantara, MS. | Konsep diri yang ada pada wanita tuna susila merupakan konstruksi dari jati diri sebelum menjadi pekerja seksual dan pemaknaan dirinya sebagai seorang pekerja seksual. Pengalaman yang mereka lewati saat mengalami masa sulit seperti pertentangan moral menjadi hal kuat yang berpengaruh terhadap konsep diri pada wanita tuna susila. | DOI:https://doi.og/10.24167/psiko.v14i2.898 |
| 25 | *Experiences and challenges of Prostitute Women in Iran: A phenomenological qualitative study* | Javad Yoosefi lebni, Seyed Fahim Irandoost, Arash Ziapour, Mohammad Ali Mohammadi Gharehghani, Farbod Ebadi Fard Azar, Goli Soofizad, Bahar Khosravi dan Mahnaz Solhi | Para perempuan pekerja seksual mempunyai banyak kerugian seperti adanya kekerasan, risiko adanya penyakit menular seksual, pengucilan sosial, objektifikasi dan kurangnya struktur pendukung sosial dan juga hukum. | DOI:10.1016/j.heliyon.2020.e05649 |
| 26 | Konsep diri orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang menerima label negatif dan diskriminasi dari lingkungan sosial | Hasna Sarikusuma dan Nur Hasanah | Konsep diri pada ODHA terbentuk dari hasil interaksi sosial dengan keluarga, teman hingga masyarakat. Mereka sering mengalami diskriminasi seperti penolakan dari keluarga hingga dikucilkan oleh masyarakat dan mereka seringkali mendapatkan label negative seperti pembawa penyakit menular hingga mayat hidup. Kedua hal itu mengakibatkan para pengidap ODHA memiliki pandangan negative tentang dirinya sendiri. | DOI:10.32734/psikologia.v7i1.2533 |
| 27 | Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana | Islamia Ayu Anindia & R.B Sularto | Hukum yang ada di Indonesia saat ini hanya dapat menjerat mucikari dan penyedia rumah border saja sedangkan untuk menjerat pengguna dan pekerja seks komersial belum ada hukum yang bisa menjerat mereka. Sehingga untuk melakukan penanggulangan dalam masalah prostitusi dibutuhkan hukum yang dapat menjerat semua pihak yang berada dalam dunia prostitusi. | DOI;10.14710/jphi.v1i1. 18-30 |
| 28 | Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Astri Candra Dewi dan Ridho Al-Hamdi | Dilihat dari dari indikator responsivitas, perataan, ketepatan, efisiensi dan kecukupan maka Perda mengenai larangan pelacuran belum berjalan dengan baik karena dari indikator-indikator tersebut hanya ada tiga indikator yang berhasil yaitu responsivitas, perataan dan ketepatan sedangkan sisanya belum berhasil.  | DOI:https://doi.og/10.33701/jiwbp.v10i2.1329 |
| 29 | Kebijakan Hukum Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Semarang | Ook Mufrohim dan Joko Setiyono | Kebijakan mengenai penutupan lokalisasi belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan prostitusi karena dengan kebijakan ini menimbulkan permasalahan yang baru yaitu munculnya prostitusi online yang makin marak. | DOI:10.30656/ajudikasi.v4i2.2265 |
| 30 | Upaya Rehabilitasi Eks Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Panti Sosial Karya Wanita (Pskw) Andam Dewi Solok | Ahmad Saefulloh Dan Nofriza | Proses rehabilitasi dilakukan dengan du acara yang pertama yaitu preventif, merupakan upaya pencegahan dengan kegiatan pembentukan wirid remaja dan pengajian rutin mingguan juga adnaya pengajuan dana bantuan usaha melalui Lembaga penyalur dana hibah. Yang kedua yaitu upaya rehabilitatif kegiatannya berupa program keagamaan, keterampialn dan kerajinan tangan dan pendampingan jangka panjang | DOI:10.24256/pal.v3i2.359 |
| 31 | Menakar Efektivitas Dakwah di Lokalisasi Pasar Kembang Yogyakarta dengan Pendekatan Model Matematika | Maryono dan Muhammad Wakhid Musthofa | Strategi dakwah yang dilakukan untuk menanggulangi masalah prostitusi masih belum efektif untuk mengurangi jumlah wanita tuna susila. Terbukti hanya ada empat orang pertahun pekerja seksual yang keluar dari dunia prostitusi. | DOI:https://doi.og/10.20885/millah.vol18.iss1.art8 |
| 32 | Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Udangan Yang Berlaku Di Indonesia | Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu & Elsya Sulimin | Penyabab terjadinya prostitusi *online* dari faktor internal seperti hubungan keluarga yang tidak harmonis dan lingkungan pergaulan pertemanan dan faktor eksternal seperti masalah ekonomi dan faktor menghindari petugas berwenang. Ada cara preventif untuk menanggulangi prostitusi online yaitu sarana pendidikan, pemerataan pekerjaan informal, pendampingan ekonomi oleh *stakeholder* terkai dan peningkatan sosial dan budaya. Sedangkan upaya represfif melalui sarana sanksi hukum. | DOI:https://doi.og/10.25139/lex.v2i2.1411 |
| 33 | Pemberdayaan Eks Pekerja Seks Komersial dalam Kajian Filsafat Ilmu | Evi Yulia dan Mugi Harsono | Pemberdayaan pada eks PSK dilakukan dalam tiga pilar filsafat ilmu yang pertama hakikat pemberdayaan dipandang dari aspek ontologis yaitu pemberian kekuatan kepada masyarakat yang dipandang lemah. Yang kedua aspek epistomologis yang didalamnya terdapat fenomena, sarana dan tatacara. Sedangakan yang ketiga ada aspek aksiologi yaitu penyadaran diri melalui pendekatan lingual.  | DOI:10.22437/jssh.v5i1.13139 |
| 34 | Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Pulih | Khusnul Fadilah | Pemulihan yang dilakukan dengan pendampingan dan konseling pada korban kekerasan seksual. Dalam proses pemulihan terjadi tahapan emosi mulai dari penyangkalan, kemarahan, penerimaan hingga depresi walaupun setiap korban tidak mengalami semua tahapan emosi yang sama. Dalam proses pemulihan terdapat faktor penghambat dan pendukung yang berasal dari keluarga, teman dan lingkungan sosial. | DOI:10.15408/empati.v7i2.11423 |
| 35 | Studi Kualitatif Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Daerah Jondul Kota Pekanbaru Tahun 2016 | Febri Destrianti dan Yessi Harnani | Wanita tuna susila menjadi seorang pekerja seksual dikarenakan ajakan teman, mereka mengetahui mengenai pekerjaan yang mereka lakukan. Alasan mereka tetap mau bekerja sebagai PSK karena ekonomi, keluarga dan sakit hati karena gagal berumah tangga. Untuk pendidikan dan risiko kesehatan mereka sudang cukup baik. Untuk menjaga agar mereka tidak mengalami kehamilan mereka memakai suntikan KB tiga bulan sekali. | DOI:10.22216/jen.v3i2.1021 |
| 36 | Implementasi Pelatihan *Lifeskill* untuk Meningkatkan Motivasi Berwirausaha Wanita Tuna Susila di Panti Sosial Karya Budi Rini | Wahyu Winandi dan Muhammad Arief Rizka | Pelatihan *lifeskills* yang diberikan berupa pelatihan tata boga. Hal ini dilakukan agar memiliki motivasi untuk berwirausaha dan mengusai keterampilan dalam bidang tata boga. Adanya media pendukung juga seperti modal bantuan usaha seperti alat-alat daput atau fasilitas memasak yang diberikan oleh pihak panti diharapkan dapat berfungsi sebagai media pendukung untuk belajar dan terjun ke dunia wirausaha. | DOI:https://doi.og/10.33394/jk.v4i1.908 |
| 37 | Pelayanan Sosial Bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Melalui Lembaga konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Azwina Az-Zahrah | Pekerja sosial dalam memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat dapat menggunakan azas mikro yang dilakukan dengan proses konsultasi, konseling dan pemberian informasi terhadap individu atau keluarga terkait. Masalah psikologis keluarga dikarenakan kurangnya penanaman budi pekerti dan pengaruh berbagai budaya luar dan mudah mengakses secara bebas terkait informasi yang berkaitan dengan perubahan pola sikap dan perilaku seseorang. | DOI:http://103.20.188.221/index.php/lbrmasy/article/view/2288 |
| 38 | Gambaran Tingkat Pengetahuan Wanita Pekerja Seks Komersial Tentang Infeksi Menular Seksual | Santa Maria Pangaribuan & Wiwi Mardiah | Pengetahuan yang dimiliki oleh para wanita tuna susila mengenai infeksi menular seksual sebagian berada dalam kategori cukup. Dengan ini dapat disebutkan para para pekerja seksual mengetahui dan memahami pengetahuan tentang penyakit menular seksual. Namun masih banyak juga para pekerja seksual yang memiliki pengetahuan yang rendah terkait penyakit menular seksual. | DOI:10.17509/jpki.v3i2.9423 |
| 39 | Hubungan Agama dan Pekerjaan Sebagai PSK di Kembang Kuning Surabaya | Neny Sujianti, Tito Surya Baskara, Bella Ayu D, Nimas Noormala D & Ahmad Machfud Fauzi | Menjadi PSK disebabkan oleh berbagai dorongan dari lingkungan, keluarga, ekonomi yang merupakan pengalaman umum setiao individu. Pengalaman yang berbeda tersebut dapat menjadi pendorong penyabab menjadi pekerja seksual. Karena agama sudah melekat terhadap individu maka untuk umat muslim ibadah seperti sholat dan puas walaupun seorang PSK mereka terkadang tetap melakukan ibadah. Di bulan Ramadhan kegiatan prostitusi masih berjalan hal ini dikarenakan faktor ekonomi. Dalam diri PSK duniawi masih dominan ketimbang taat terhadap ajaran agama. | DOI:https://doi.og/10.37108/tabuah.v24i2.347 |
| 40 | Implikasi Hukum Larangan Prostitusi Di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) | Allam Izza Naufal & Pujiyono | Dalam peraturan daerah Situbondo berbeda dengan KUHP dimana dalam peraturan daerah ini dapat memberikan sanksi kepada pengguna jasa PSK dan PSK beserta orang yang berada alam tempat prostitusi tersebut. Berbeda dengan peraturan dalam KUHP dimana sanksi hanya diberikan terhadap mucikari dan penyedia jasa prostitusi. | DOI:https://doi.og/10.32503/diversi.v7i1.1488 |
| 41 | Peran LSM Kusuma Buana Dalam Pendampingan Psk Di Desa Bongas, Indramayu, Jawa Barat | Erllyn Nurdiansyah | Peran LSM sebagai pendamping PSK menjadi rumah sementara dan sahabat bagi para pekerja seksual dan LSM memberikan pendidikan kemandirian. Selain itu LSM berperan sebagai fasilitator dan katalisator dengan membantu memecahkan masalah. Sebagai pendidik dengan mencarikan dan menyalurkan informasi dari luar. Ketiga menjadi pemupuk modal dengan mendorong upaya-upaya penghematan, menabung dan usaha produktif. Program pendampingan yang dilakakun seperti pemberdayaan masyarakat, layanan kesehatan dan kegiatan keterampilan berupa keterampilan menjahit dan tata boga. | DOI:10.21831/dimensia.v6i1.3368 |

**Sumber: Hasil Penelitian Studi Literatur 2022**

Tabel penelitian terdahulu diatas digunakan untuk menjadi referensi atau acuan dasar dalam melakukan penelitian ini. Dari penelitian-penelitian terdahulu ada beberapa yang sudah membahas bagaimana konsep diri dari seorang wanita tuna susila. Yang dimana hal tersebut sejalan dengan apa yang ingin peneliti lakukan yaitu mengenai penelitian bagaimana konsep diri wanita tuna susila secara umum.

 Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Weillon Chaidir & Josetta Maria R. Tuapattinaja (2019) menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian bagaimana peran dukungan dari sekitar membangun konsep diri dalam melanjutkan kehidupan para wanita tuna susila (WTS). Penelitian lain yang dilakukan oleh Ade Septia Lumban Gaol & Hernawilly Gustop Amatiria (2014) meneliti mengenai bagaimana konsep diri pada wanita tuna susila dapat berubah saat mereka mengalami penurunan atau perubahan dalam dirinya.

2.2 Konsep Kesejahteraan Sosial

### 2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

 Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat terjadi dimasyarakat, dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Kesejahteraan sosial dapat terwujud jika ada suatu tindakan yang nyata dan tepat. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan suatu kesejahteraan yang tentunya dapat dirasakan oleh setiap kalangan masyarakat. Tindakan atau upaya dapat dilakukan oleh setiap elemen yang ada di masyarakat seperti pemerintah maupun organisasi yang ada di masyarakat. Adapun pengertian Kesejahteraan sosial menurut Edi Suharto dalam bukunya Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (2014: 1) bahwa kesejahteraan sosial adalah:

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu langkah atau tindakan yang dilakukan secara terorganisir yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Tujuan dari kegiatannya adalah untuk meningkatkan kualitias hidup setiap individu, kelompok dan masyarakat. Kesejahteraan sosial dapat terwujud jika adanya hubungan yang sinergis seperti mulai dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah dalam menjalankan program maupun kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang menyangkut kesejahteraan sosial masyarakat.

 Kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana jika masyarakat sudah dapat hidup layak dan mereka mampu untuk mengembangkan setiap potensi dan kemampuan yang mereka miliki sehingga mereka dapat memenuhi setiap kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan material, spiritual maupun sosialnya. Jika individu, kelompok dan masyarakat sudah mampu untuk memenuhi kebutuhannya makan mereka akan dapat menjalankan fungsi sosial sesuai dengan perannya, jika sudah seperti itu maka kesejahteraan sosial akan terwujud. Adapun pengertian kesejahteraan sosial yang lain menurut Walter A. Friedlander dalam (Wahyuningsih, 2018) adalah:

Kesejahteraan Sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ditunjukkan untuk membantu individu atau kelompok dalam mencapai standart hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan- kebutuhan keluarga dan masyarakat.

 Berdasarkan kedua pengertian kesejahteraan menurut para ahli diatas sudah jelas bahwa kesejahteraan merupakan suatu kegiatan atau sistem yang terorganisir yang membantu individu atau kelompok dalam mencapai standar hidup mereka. Dimana dalam pelakasnaannya usaha-usaha yang dilakukan adalah berusaha untuk mengembangkn kemampuan-kemampuan yang dimiliki dan dari kemampuan tersebut akan dimaksimalkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhannya.

### 2.2.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

 Kesejahteraan sosial bertujuan untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. Sudah selayaknya kesejahteraan sosial diupayakan secara maksimal, karena pada dasarnya kesejahteraan sosial menyangkut kehidupan seseorang oleh karena itu perlu diupayakan semaksimal mungkin agar tercipta kehidupan yang lebih baik pada masyakarat. Adapun tujuan kesejahteraan sosial menurut Wahyuningsih (2018) sebagai berikut:

1. Mencapai kehidupan yang sejahtera dalam artian tercapaianya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi –relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuain diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.
3. Pembangunan Kesejahteraan Sosial didefinisikan sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan modal ekonomi *(economic capital),* Manusia *(human capital),* Kemasyarakatan *(Society capital),* dan perlindungan *(security capital)* secara terintegrasi dan berkesinambungan. Peningkatan modal ekonomi masyarakat adalah tubuhnya mata pencaharian *(livelihood)* yang memungkinkan mereka memperoleh dan mengelola asset-aset finansial dan material. Dengan demikian, pada gilirannya mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar kemanusian yang layak dan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan kesejahteraan sosial yang disampaikan oleh Wahyuningsih yang pertama yaitu tercapainya kehidupan yang sejahtera, dimana artinya segala aspek kehidupan harus terpenuhi seperti sandang, pangan dan papan serta hubungan dengan lingkungan sekitar harus terjalin dengan baik. Tujuan yang kedua dimana dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan diusahakan untuk selalu menggali, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup sehingga taraf hidup seseorang dapat naik. Dan yang ketiga peningkatan kualitas hidup dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti peningkatan modal ekonomi, manusia, kemasyarakatan dan perlindungan yang secara terintegrasi dan berkesinambungan.

### 2.2.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

 Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi atau keadaan yang sangat penting bagi setiap individu, untuk meningkatkan kualitas hidup maka fungsi dari kesejahteraan sosial harus dapat direalisasikan secara benar agar dapat dirasakan oleh setiap kalangan masyarakat. Fungsi dari kesejahteraan sosial pada dasarnya yaitu untuk memperbaiki kondisi kehidupan melalui pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia secara berproses agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlender dan Apte dalam Az-Zahrah (2018) sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan *(Preventive)*

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan *(Curative)*

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosi, dan sosial agar yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan *(Development)*

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang *(Supportive)*

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang kesejahteraan sosial yang lain.

Dari beberapa fungsi diatas maka dapat dikatakan bahwa fungsi dari kesejahteraan sosial sangat beragam sehingga fungsi-fungsi diatas dapat digunakan sesuai dengan kondis dan keadaan masyarakat. Setiap masyarakat tentunya memiliki permasalah atau karakteristik yang berbeda sehingga fungsi kesejahteraan sosial harus disesuaikan dengan keadaan yang dialami oleh masyarakat.

2.3 Konsep Pekerjaan Sosial

### 2.3.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial merupakan profesi yang memberikan pelayanan professional yang dimana mereka membantu individu, kelompok atau masyarakat untuk meningkatkan dan memperbaiki kemampuan mereka agar mereka dapat kembali berfungsi secara sosial, hal itu dilakukan dengan menggunakan keterampilan, pengetahuan metode dan teknik yang mereka miliki. Secara lebih sempit pekerja sosial membantu mengembalikan keberfungsian sosial dari individu, kelompok maupun masyarakat. Adapun definisi pekerjaan sosial menurut Zastrow (1999) dalam Suharto (2014: 24) adalah:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

 Pekerjaan sosial merupakan suatu kegiatan profesional yang dilakukan dalam bidang kemanusiaan dan dalam pelaksanaanya para pekerja sosial ini tentunya sudah dibekali oleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang telah dipelajari atau didapatkan selama menjalani pendidikan. Dalam kegiatannya untuk mengatasi masalah sosial para pekerja sosial ini biasanya mereka akan terjun langsung dalam pelayanannya dalam membantu individu, kelompok dan masyarakat yang membutuhkan. Adapun pengertian pekerjaan sosial menurut *Internasional Federation of Social Workers (IFSW)* dalam (Suharto: 25) menyatakan pekerjaan sosial adalah:

Profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat. Menggunakan teori- teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik (atau situasi) di mana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak azasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu profesi dimana para pekerja sosial membantu pemecahan masalah yang sedang terjadi dengan menggunak teori-teori dan pengetahuan tentang kemanusian yang sesuai, dalam proses pertolongan yang dilakukan pekerjaan sosial akan melakukan intervensi dengan lingkungan sekitarnya untuk mengetahui dengan jelas dan detail permasalahan yang sedang terjadi.

### 2.3.2 Dasar-dasar Pengetahuan Pekerjaan Sosial

 Proses pertolongan dapat dilakukan dengan baik dalam pekerjaan sosial jika memiliki pengetahuan yang mumpuni. Pengetahuan tentunya sangat penting dalam pelaksaan pertolongan dilapangan, dengan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki tentu akan mempermudah pemecahan masalah yang terjadi. Seperti dasar pengetahuan *(knowledge base)* menurut Johnson & Schwartz (1951) dalam Wibhawa, Raharjo, & Santoso, (2015: 81) sebagai berikut:

1. Pengetahuan yang diperoleh dari ilmu alam, sosial, dan perilaku;
2. Pengetahuan yang dikembangkan dari para pekerja sosial sendiri berdasarkan pengalaman dalam melakukan dan membantu orang, dikatakan sebagai *“pactice wisdom”;*
3. Pengetahuan yang dikembangkan melalui upaya-upaya penelitian.

Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa pekerja sosial harus dapat memperluas dasar pengetahuannya tetapi tetap dengan batasan pengetahuan sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai perkembangan dan perilaku manusia yang dimana sumber utama dari pengetahuan ini yaitu diperoleh dari kekuatan dan keluasan pendidikan yang ada. Hal ini termasuk didalamnya ada pengetahuan yang diperoleh dari ilmu-ilmu sosial dan perilaku, pengetahuan yang diperoleh dari ilmu alam dan pengetahuan yang diperoleh melalui studi dalam kemanusiaan.
2. Pengetahuan tentang hubungan dan interaksi manusia.
3. Pengetahuan tentang teori-teori praktik pekerjaan sosial yang tepat untuk berbagai situasi praktik.
4. Pengetahuan tentang kebijakan dan pelayanan sosial.
5. Pengetahuan diri atau *self-knowledge.*
6. Pengetahuan khusus yang memungkinkan pekerja sosial bekerja di dalam suatu kelompok tertentu.

Pengetahuan yang harus dimiliki pekerja sosial dapat membantu meringankan mereka dalam pemecahan masalah. Oleh karena itu dasar pengetahuan pekerjaan sosial sangat penting untuk dikuasai oleh seorang pekerja sosial. Adapun dasar pengetahuan menurut Siporin (1975) dalam Wibhawa & Dkk (2015: 81) menyebutkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan assessment, memungkinkan pekerja sosial untuk menilai dan memahami perhatian (urusan), kebutuhan, dan masalah-masalah manusia sesuai dengan situasi yang mereka hadapi.
2. Pengetahuan intervensi, pengetahuan yang digunakan oleh pekerja sosial untuk melakukan proses pemecahan masalah, yaitu membantu perseorangan, kelompok- kelompok, atau masyarakat agar secara efektif mampu manghaapi permasalahan. Pengetahuan intervensi biasanya spesifik pada permasalahan klien, seting lembaga, dan bidang praktik khusus.

Kedua pendapat mengenai dasar pengetahuan pekerjaan sosial memperlihatkan bahwa sudah jelas pengetahuan adalah hal penting dalam proses pertolongan yang dilakukan oleh pekerja sosial. Dengan disertai pengetahuan maka pekerjaan sosial dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Tentunya dengan pengetahuan yang dikuasai pekerja sosial dapat mengambil langkah yang tepat untuk proses pertolongan yang akan dilakukan.

### 2.3.3 Peran Pekerjaan Sosial

Peran dari seorang pekerja sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah direncanakan secara terorganisir guna memecahkan masalah yang terjadi. Peran-peran dalam pekerjaan sosial sangat beragam sehingga dalam penggunaannya peran-peran tersebut dipilih sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi seperti dalam Wibhawa & Dkk (2015: 114) menyebutkan bahwa terdapat variabel yang menentukan peranan pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan dulaistis dalam pekerjaan sosial, yaitu perubahan dan pengembangan personal serta perubahan dan pengembangan sosial sebagai satu kesatuan;
2. Fungsi-fungsi praktik pekerjaan sosial yang saling berkaitan yaitu pencegahan, dengan peranan-peranan penelitian, analisis, penyusunan dan pengembangan kebijakan, program dan pelayanan kesejahteraan sosial.

Peranan yang ditampilkan atau yang dilakukan oleh pekerja sosial akan bervariasi tergantung masalah yang sedang mereka selesaikan. Peran yang tepat akan mempercepat dan mempermudah proses pemecahan masalah oleh karena itu suatu peran harus dipilih dengan baik. Adapun peran-peran dalam pekerjaan sosial menurut Bradford W. Sheafor dan Charles R. Horejsi dalam Wibhawa & Dkk (2015: 115) sebagai berikut:

1. Peranan sebagai perantara *(broker role),* pekerja sosial bertindak di antara klien atau penerima pelayanan dengan sistem sumber. Pekerja sosial juga berupaya membentuk jaringan kerja dengan organisasi pelayanan sosial untuk mengontrol kualitas pelayanan sosial tersebut.
2. Peranan sebagai pemungkin *(enabler role),* peranan yang paling sering digunakan dalarn profesi pekerjaan sosial karena peranan ini diilhami oleh konsep pernberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, kapasitas, dan kompetensi klien atau penerima pelayanan untuk menolong dirinya sendiri. Cara yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah mengidentifikasi tujuan, memfasilitasi untuk berkomunikasi, mengkohesifkan dan mensinerjikan suatu hubungan, dan memberikan peluang untuk pemecahan masalah/ menyelesaikan konflik.
3. Peranan sebagai penghubung *(mediator role),* Pekerja sosial bertindak untuk mencari kesepakatan, meningkatkan rekonsiliasasi berbagai perbedaan, untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan, dan untuk berintervensi pada bagian- bagian yang sedang konflik, ter-masuk di dalamnya membicarakan segala persoalan dengan cara kompromi dan persuasif. Peranan yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah membantu menyelesaikan konflik di antara dua sistem atau lebih, menyelesaikan pertikaian antara keluarga dan klien atau penerima pelayanan, dan memperoleh hak-hak korban.
4. Peranan sebagai advokasi *(advocator role),* sebagai juru bicara klien atau penerima pelayanan, memaparkan dan berargumentasi tentang masalah klien atau penerima pelayanan apabila diperlukan, membela kepentingan korban untuk menjamin sistem sumber, memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau merubah kebijakan sistem yang tidak responsif terhadap kepentingan korban juga dalam hal menyediakan pelayanan yang dibutuhkan, dan mengembangkan program.
5. Peranan sebagai perunding *(conferee role),* peranan yang diasumsikan ketika pekerja sosial dan klien atau penerima pelayanan mulai bekerja sama. Peranan ini dilakukan pada saat pencarian data, pemberian gambaran pada korban penyalahguna narkoba tentang hal apa yang harus dilakukan, dan melaksanakan kontrak pada tahap berikutnya.
6. Peranan sebagai pelindung *(guardian role),* peran seperti melindungi klien atau penerima pelayanan, dan orang yang berisiko tinggi terhadap kehidupan sosial. Korban merasa nyaman untuk mengutarakan masalahnya, beban dalam pikirannya terlepas, dan merasa bahwa masalahnya dapat dirahasiakan pekerja sosial.
7. Peranan sebagai fasilitasi *(facilitator role),* dilakukan untuk membantu korban berpartisipasi, berkontribusi, mengikuti keterampilan baru dan menyimpulkan apa yang telah dicapai oleh korban dan membantu meningkatkan keberfungsian korban khususnya berkaitan dengan kebutuhan, dan tujuan yang ingin dicapai.
8. Peranan sebagai inisiator *(initiator role),* pekerja sosial berupaya memberikan perhatian pada isu-isu seperti masalah-masalah korban yang ada di badan/lembaga/panti sosial, dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.
9. Peranan sebagai negosiator *(negotiator role),* ditujukan pada para klien atau penerima pelayanan yang mengalami konflik dari mencari penyelesaiannya dengan kompromi sehingga tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak. Seorang negosiator berada pada salah satu posisi yang sedang konflik.

Peran-peran diatas memiliki fungsi masing-masing, oleh karena itu penggunaan peranannya harus disesuaikan dengan kebutuhan atau masalah seperti apa yang sedang dihadapi. Peranan yang dipakai sesuai dengan apa yang pekerja sosial anggap bahwa peran itu cocok untuk masalah yang sedang mereka pecahkan. Dengan bervariasinya peran-peran tersebut diharapkan akan lebih mempermudah penyelesaian dalam proses pertolongan yang dilakukan dalam pekerjaan sosial.

2.4 Konsep Masalah Sosial

### 2.4.1 Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial akan mempengaruhi kesejahteraan sosial dimana masalah sosial ini sering muncul di lingkungan masyarakat yang tentunya menjadi penghalang dalam mendapatkan kesejahteraan. Masalah sosial merupakan suatu keadaan dimana kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, masyarakat akan melakukan kegiatan yang menyimpang dari aturan, norma maupun nilai yang berlaku di masyarakat. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan kesejahteraan mereka. Adapun definisi masalah sosial menurut Horton and Leslie (1982) dalam Suharto (2014) adalah, masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif.

Dari pengertian diatas masalah sosial adalah dimana individu merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan yang dimana hal itu membutuhkan proses pertolongan yang dilakukan agar kembalinya kondisi yang lebih baik, dalam proses pemecahan masalahnya suatu masalah sosial harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak yang bersangkutan. Adapun pengertian masalah sosial menurut Soerjono Soekanto dalam Burlian (2016: 16) yang mengatakan masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Selain dari Soerjono Soekanto ada juga pengertian masalah sosial menurut Blumer (1971) dan Thompson (1988) dalam Burlian (2016: 16) yang mengatakan masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirumuskan atau dinyatakan oleh suatu entitas berpengaruh yang mengancam nilai-nilai suatu masyarakat dan kondisi itu diharapkan dapat diatasi melalui kegiatan bersama.

Pengertian masalah sosial menurut kedua ahli diatas sejalan dengan pengertian dari Horton dan Leslie yang dimana semua ahli tersebut menyatakan bahwa masalah sosial adalah suatu masalah yang membutuhkan penanganan serius yang dimana jika tidak akan membahayakan kelompok sosial yang mengalam masalah sosial tersebut, penyelesaian masalah sosial dapat dilakukan melalui kegiatan kolektif atau kegiatan bersama dengan adanya keterlibatan berbagai pihak guna memecahkan masalah yang terjadi sehingga dengan adanya partisipasi bersama masalah sosial akan lebih mudah untuk ditangani.

### 2.4.2 Karakteristik Masalah Sosial

 Masalah sosial yang ada dimasyarakat sangat beragam, oleh karena itu dalam pemecahannya juga membutuhkan cara yang berbeda-beda. Banyaknya masalah sosial juga disebabkan oleh berbagai penyabab yang menjadikan suatu kondisi berubah menjadi suatu permasalahan sosial yang tentunya membutuhkan suatu proses pemecahan. Adapun karakteristik dari masalah sosial menurut Suharto (2014: 84) sebagai berikut:

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang. Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapat perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial. Peran media massa sangat menentukan apakah masalah tertentu menjadi pembicaraan khalayak umum. Jika sejumlah artikel atau berita yang membahas suatu masalah muncul di media massa, masalah tersebut akan segera menarik perhatian orang.
2. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan. Menurutfaham hedonisme, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak mengenakan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat pentingdalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya. Ukuran 'baik' atau 'buruk' sangat bergantung pada nilai atau norma yang dianut masyarakat.
3. Kondisi yang menuntut pemecahan. Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Bila seseorang merasa lapar, akan segera dicarinya rumah makan. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan.
4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif. Masalah sosial berbeda dengan masalah individual, masalah individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

Dari keempat karakteristik masalah sosial jelas terlihat bahwa masalah sosial merupakan suatu masalah yang dirasakan oleh banyak orang sehingga menuntut adanya suatu pemecahan masalah karena dirasa masalah sosial adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Namun dalam pemecahannya membutuhkan adanya kerjasama atau pemecahan masalah secara kolektif. Dimana untuk pemecahan masalah sosial dibutuhkan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

### 2.4.3 Jenis-jenis Masalah Sosial

Penyebab dari masalah sosial itu beraneka macam jadi sasalah sosialpun beragam, setiap masalah sosial membutuhkan suatu pemecahan secara kolektif, pada dasarnya masalah sosial yang terjadi dimasyarakat itu sangat beragam. Jadi setiap jenis masalah sosial yang ada membutuhkan suatu penanganan yang berbeda. Adapun jenis-jenis dari masalah sosial menurut Burlian (2016: 13) sebagai berikut:

1. Konflik dan kesenjangan, seperti kemiskinan, kesenjangan, konflik antar-kelompok, pelecehan seksual, dan masalah sosial.
2. Perilaku menyimpang, seperti kecanduan obat terlarang, gangguan mental, kejahatan, kenakalan remaja, dan kekerasan pergaulan.
3. Perkembangan manusia, seperti masalah keluarga, usia lanjut, kependudukan (seperti urbanisasi), dan kesehatan seksual.

Berbagai jenis masalah sosial yang terjadi dimasyarakat ini disebabkan oleh berbagai alasan, salah satu bentuk dari penyebab suatu masalah sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup maka seseorang akan cenderung melakukan suatu tindakan yang menyimpang hingga menyebabkan suatu permasalahan.

2.5 Konsep Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

### 2.5.1 Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan individu atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi sosialnya sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya seperti jasmani, rohani, sosial maupun ekonomi yang akhirnya mempengaruhi kehidupannya. Menurut Dinas Sosial dalam Hutapea et al., (2019) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah:

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

 Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) membutuhkan penanganan yang tepat agar individu, kelompok dan masyarakat dapat menjalankan fungsi sosialnya. Karena keberfungsian sosial sangat penting bagi individu, kelompok dan masyarakat dalam kehidupannya. Keberfungsian sosial menurut Suharto (2014: 28) adalah kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan *(shocks and stresses).*

### 2.5.2 Jenis-jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

 Terdapat beberapa jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), kondisi dari PMKS ini biasanya tidak hanya mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan saja adapula kelompok PMKS yang mengalami ketelantaran psikologis, sosial maupun politik. Menurut Dinas Sosial yang dikutip dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Buleleng menyebutkan terdapat 22 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. **Anak Balita Terlantar**, adalah anak yang berusia 0-4 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin, tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani, rohani dan sosial.
2. **Anak Terlantar**, adalah anak yang berusia 5-18 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin, tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh atau pengampu) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani, rohani dan sosial.
3. **Anak Nakal, a**dalah anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum, akan tetapi karena usia maka belum dapat dituntut secara hukum.
4. **Anak Jalanan,** adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat umum.
5. **Wanita Rawan Sosial Ekonomi,**adalah seorang wanita dewasa berusia 19-59 tahun belum menikah atau janda tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
6. **Korban Tindak Kekerasan,** adalah seseorang yang terancam secara fisik maupun non fisik(psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdakwa. Dalam hal ini termasuk anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan.
7. **Lanjut Usia Terlantar, a**dalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
8. **Penyandang Cacat,** adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik maupun mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental. Dalam hal ini termasuk anak cacat, penyandang cacat eks penyakit kronis.
9. **Tuna Susila,**adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
10. **Pengemis,** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara, dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
11. **Gelandangan.** Adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengambara di tempat umum.
12. **Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK),** adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
13. **Korban Penyalahgunaan Napza,** adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
14. **14. Keluarga Fakir Miskin.** Adalah seseorang atau lepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
15. **Keluarga Berumah Tak Layak Huni,** adalah keluarga yang kondisi perumahan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
16. **Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis,**adalah keluarga yang hubungan antar keluarganya terutama antara suami-isteri kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
17. **Komunitas Adat terpencil,**adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.
18. **Korban Bencana Alam,** adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya. Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran pemukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah industri (kecelakaan kerja).
19. **Korban Bencana Sosial atau Pengungsi,** adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya.
20. **Pekerja Migran Bermasalah Sosial,** adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar.
21. **Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA),** adalah seseorang yang dengan rekomendasi profesional(dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar.
22. **Keluarga Rentan,** adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan 5 tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (berpenghasilan sekitar 10% di atas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

**Jenis-jenis dari** penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) diatas membutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk dapat menuntaskan dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tersebut. Oleh karena itu diperlukan berbagai kebijakan atau program yang dapat menunjang para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk dapat menyelesaikan masalahnya dan mereka dapat menjalankan fungsinya kembali.

2.6 Konsep Wanita Tuna Susila (WTS)

### 2.6.1 Pengertian Wanita Tuna Susila (WTS)

Tuna susila merupakan suatu perilaku yang tidak baik dimana para pelaku melakukan hal yang melanggar norma, aturan dan nilai yang berlaku di masyarakat. Tuna susila dapat dilakukan oleh perempuan maupun lelaki dan tidak terlepas dari Batasan usia. Banyak terdapat para penyandang tuna susila berada di bawah umur. Tuna susila ini kerap dialami atau kebanyakan para penyandangnya yaitu kaum perempuan. Wanita tuna susila (WTS) adapun yang menyebutnya dengan wanita pekerja seks komersial (PSK) atau masyarakat sering menyebutnya dengan pelacur atau pelacuran dapat dikatakan perempuan yang berani menjual dirinya kepada lelaki untuk memuaskan seksualnya dengan imbalan uang bagi pelayanannya. Menurut Kartini Kartono dalam buku Patologi Sosial oleh Burlian (2016: 203) wanita tuna susila (WTS) atau pelacuran adalah:

Pelacuran merupakan perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan gejala jalan memperjual belikan badan, kehormatan, dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

Adapun pengertian wanita tuna susila menurut Bonger yang dikutip dari Nofra & Kharisma (2019) adalah wanita yang menjual diri serta melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Selain itu ada pengertian Soedjono (1977) yang di kutip dari Ramadhani Dkk (2017) yang menyebutkan bahwa wanita tuna susila (WTS) adalah sebagai berikut:

Wanita Tuna Susila atau wanita pelacur adalah wanita yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seksual laki – laki siapapun yang menginginkannya, dimana wanita tersebut menerima sejumlah uang atau barang (umumnya dengan uang dari laki-laki pemakaianya).

Para wanita tuna susila (WTS) jika dilihat dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa para wanita yang rela menjual badannya demi mendapatkan imbalan uang. Tentunya banyak yang menjadi penyabab mengapa para wanita tersebut memilih untun menjadi tuna susila, namun kebanyakan dari mereka pastinya memiliki alasan kenapa memilih pekerjaan tersebut dikarenakan masalah ekonomi, dimana mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memilih jalan yang mudah yaitu dengan menjadi wanita tuna susila (WTS).

### 2.6.2 Faktor-faktor Penyebab Menjadi Wanita Tuna Susila (WTS)

Terhimpit masalah ekonomi menjadi penyebab utama kebanyakan dari para perempuan memilih jalan yang terkesan mudah. Menjadi seorang tuna susila tidak hanya mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitar tetapi keluargapun bisa memberikan respon yang negatif. Namun para wanita tersebut tetap memilih menjadi tuna susila dibandingkan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ada faktor-faktor penyebab wanita lebih memilih menjadi wanita tuna susila (WTS) menurut Kartono (2014) yang dikutip dari Ramadhani Dkk (2017) sebagai berikut:

1. Salah satu faktor yang membuat wanita menjadi seorang tuna susila adalah untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Faktor lainnya adalah kurangnya pengertian, pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
2. Untuk menjadi seorang pekerja seks tidak memerlukan keterampilan/skiil, tidak memerlukan intelegensi tinggi, mudah dikerjakan. Modal utama dari pekerjaan ini hanyalah kecantikan, dan keberanian.
3. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Rendahnya tingkat pendidikan seringkali menjadi alasan para wanita memilih menjadi tuna susila walaupun terkadang ada juga wanita dengan tingkat pendidikan yang tinggi tetap memilih menjadi tuna susila dikarenakan untuk memuaskan perasaan seksualnya ataupun untuk menambah penghasilan mereka. Tidak adanya batasan atau kriteria khusus asalkan memiliki paras yang rupawan menjadi penyebab lain banyaknya wanita tuna susila (WTS). Tentunya masalah ekonomi tidak akan terlepas dari masalah tuna susila yang selalu meningkat jumlahnya, demi kelangsungan hidup para wanita memilih jalan yang mudah untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

2.7 Konsep Prostitusi

### 2.7.1 Pengertian Prostitusi

Kegiatan memperjual belikan bada atau kehormatan merupaka suatu tindakan asusila yang disebut prostitusi. Kegiatan prostitusi merupakan kegiatan memperjual belikan badan atau memuaskan hawa nafsu dengan imbalan uang. Adapun prostitusi menurut Kartini Kartono dalam buku Patologi Sosial oleh Burlian (2016: 206) adalah:

Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

Prostitusi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan dimana para pelaku prostitusi melakukan tindakan seksual dengan mendapatkan imbalan berupa uang. Dalam kegiatan prostitusi biasanya terdapat orang yang akan membantu para pelaku untuk mempertemukan mereka dengan orang yang akan membayarnya, orang yang membantu para tuna susila sering disebut germo atau mucikari.

Adapun pengertian prostitusi menurut Bonger yang dikutip dari Ramadhani Dkk (2017) prostitusi ialah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan- perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Dari kedua pengertian diatas sudah jelas bahwa prostitusi merupakan suatu kegiatan menjual diri dengan melampiaskan nafsu seks yang nantinya akan mendapatkan uang sebagai imbalan. Adapun pengertian prostitusi menurut Iwan Bloch yang dikutip dari Yani & Muhammad (2020) sebagai berikut:

Prostitusi merupakan suatu bentuk perhubungan kelamin diluar pernikahan dengan pola tertentu, dilakukan yakni terhadap siapa pun secara terbuka selalu dengan pembayaran baik untuk persebadanan, maupun kegiatan seks lainnya, yang memberikan kepuasaan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.

Semua pengertian prostitusi diatas menjelaskan bahwa prostitusi merupakan suatu kegiatan memperjuabelikan badan untuk memberikan kepuasan dengan imbalan uang sebagai upah. Karena prostitusi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah maka kegiatan prostitusi sudah seharusnya diminimalisir agar tidak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat.

### 2.7.2 Faktor-faktor Penyebab Prostitusi

Kegiatan prostitusi sampai saat ini menjadi permasalahan sosial yang sulit untuk diatasi, selain dikarenakan adanya permintaan dan penawaran ada banyak faktor kenapa prostitusi sulit untuk diatasi. Banyak faktor penyebab mengapa prostitusi masih banyak terjadi di Indonesia entah itu karena ekonomi atau tingkat pendidikan yang rendah dan faktor penyabab lainnya. Seperti faktor penyebab terjadinya prostitusi menurut Burlian (2016: 208) sebagai berikut:

1. Faktor moral atau akhlak
2. Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan individu dan masyarakat, serta ketidaktakwaan terhadap ajaran agamanya.
3. Standar pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya rendah.
4. Berkembangnya pornografi secara bebas dan liar.
5. Faktor Ekonomi, adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, khususnya dengan jalan pintas dan mudah. Tanpa harus memiliki keahlian khusus, meskipun kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan rendah, berpikiran pendek sehingga menghalalkan pelacuran.
6. Faktor Sosiologis, ajakan dari teman-teman sedaerahnya yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia pelacuran. Pengalaman dan pendidikan yang sangat minim, akhirnya dengan mudah terbujuk dan terkena tipuan. Terutama dengan menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi yang akhirnya dijebloskan ke tempat-tempat pelacuran.
7. Faktor Psikologis, hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan, dan mengalami keke rasan seksual dalam keluarga, serta adanya pengalaman traumatis (luka jiwa) dan rasa ingin balas dendam yang diakibatkan oleh hal-hal, seperti kegagalan dalam perkawinan, dimadu, dinodai oleh kekasihnya yang kemudian ditinggalkan begitu saja.
8. Faktor Kemalasan, faktor kemalasan biasanya diakibatkan oleh psikis serta mental yang rendah, tidak memiliki norma agama dan susila menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan modal fisik, kecantikan sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.
9. Faktor Biologis, adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan hubungan seks dengan satu istri/suami.
10. Faktor Yuridis, tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran, serta tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan hubungan seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan sedangkan yang dilarang dalam undang- undang adalah muncikari dan germo.
11. Faktor Pendukung, adanya media atau alat pendukung dalam melakukan kegiatan prostitusi sangat memengaruhi mereka yang bekerja di bidang ini. Dengan adanya teknologi pendukung, seperti internet maupun ponsel membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi.

Faktor-faktor penyabab diatas merupakan faktor umum terjadinya prostitusi, ternyata tidak hanya dari segi ekonomi saja melainkan banyak faktor lain yang dapat menjadi penyebab mengapa kegiatan prostitusi masih terjadi seperti disebabkan oleh faktor psikologis, biologis, sosiologis, yuridis dan faktor-faktor lainnya.

### 2.7.3 Dampak Prostitusi

 Prostitusi tentunya akan menimbulkan berbagai dampak yang ada entah itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang-orang disekitarnya. Setiap kegiatan akan menimbulkan suatu dampak entah itu damak postif maupun negatif, namun untuk prostitusi jelas akan lebih berdampak ke negatif. Karena prostitusi merupakan kegiatan yang melanggar norma atau nilai yang ada di masyarakat, dari segi kesehatan pun kegiatan prostitusi merupakan kegiatan yang akan menyebabkan seseorang memiliki atau menyebarkan penyakit kelamin yang serius. Ada beberapa dampak dari kegiatan prostitusi menurut Burlian (2016: 210) yaitu sebagai berikut:

1. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit, terutama sifilis dan gonore (kencing nanah).
2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga sehingga keluarga menjadi berantakan.
3. Mendemoralisasikan atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada ling- kungan khususnya anak-anak muda pada masa puber dan adolesensi.
4. Berkolerasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika.
5. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama.
6. Dapat menyebabkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya impotensi, an- orgasme, nimfomania, satyriasis, dan ejakulasi dini.

Dampak dari prostitusi tidak hanya menjadi tempat untuk menularkan penyakit kelamin saja melainkan lebih banyak lagi. Seperti dampak-dampak diatas seperti menyebabkan masalah sosial yang baru yaitu kecanduan dengan obat-obatan terlarang. Selain itu prostitusi dapat merusak kehidupan rumah tangga seseorang dan masih banyak dampak lainnya seperti yang sudah disebutkan diatas.

2.8 Tinjauan Konsep Diri

### 2.8.1 Pengertian Konsep Diri

Konsep diri merupakan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dari berbagai aspek seperti fisik, psikologis, sosial, ekonomi dan lainnya. Konsep diri tentunya mempengaruhi kehidupan seseorang, karena konsep diri adalah bagaiman individu tersebut menilai atau memandang dirinya sendiri. Adapun pengertian konsep diri menurut Hurlock dalam Ihsan Mz (2018) adalah:

konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya. Konsep diri merupakan akumulasi dari keyakinan seseorang tentang dirinya yang meliputi karakter fisik, psikologis, emosional, sosial, prestasi dan aspirasi. Karenanya, konsep diri sangat terkait dengan kesadaran diri seseorang.

Konsep diri menurut Hurlock adalah bagaimana individu memandang dirinya sendiri dari berbagai aspek seperti bagaimana individu memandang fisik, psikologis, sosial, prestasi dan aspirasinya. Adapun pengertian konsep diri menurut Burns yang dikutip dari Utami & Asih (2017) konsep diri adalah hubungan antara sikap dan keyakinan tentang diri sendiri, termasuk sikap, perasaan, persepsi, nilai-nilai dan perilaku yang unik dari individu tersebut.

Williarn D. Brooks mendefinisikan konsep diri sebagai pandangan dan perasaan kira tentang diri kita. Persepsi tentang diri ini boleh bersifat psikologi, sosial, dan fisis. Dari ketiga pengertian mengenai konsep diri diatas dapat dikatakan bahwa konsep diri erat kaitannya dengan berbagai pandangan seperti bagaimana seseorang memandang fisiknya, sosial maupun psikologis dan lainnya terhadap diri sendiri.

### 2.8.2 Komponen Konsep Diri

Konsep diri erat kaitannya dengan bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pembentukan konsep diri akan terus terjadi atau berkembang sejalan dengan bagaimana individu tersebut berkembang. Menurut Hurlock (1997) yang dikutip dari Ihsan Mz (2018) ada dua tingkatan konsep diri sebagai berikut:

1. Konsep diri positif, individu mengembangkan sifat–sifat seperti percaya diri, menghargai diri sendiri dan kemampuan untuk melihat dirinya secara realistis. Kemudian menilai hubungan orang lain secara tepat dan ini menumbuhkan penyesuaian pribadi dan sosial yang baik.
2. Konsep diri negatif. Individu akan mengembangkan perasaan tidak mampu dan rendah diri. Merasa ragu dan kurang percaya diri, hal ini akan menimbulkan penyesuaian pribadi dan sosial yang buruk.

Untuk menghasilkan konsep diri yang positif setiap individu akan berusaha untuk melakukan setiap cara agar yang mereka lakukan akan memberikan kesan atau reaksi positif untuk orang-orang sekitarnya dan yang lebih penting untuk mendapatkan konsep diri yang postif adalah bagaimana individu menghargai dirinya sendiri yang akan memberikan kesan positif terhadap dirinya sendiri. Pembentuk konsep diri sangat penting dalam menghasilkan apakah konsep diri akan postif atau malah sebaliknya yaitu negatif. Seperti bagaiman hubungan individu dengan keluarganya, dimana keluarga menjadi sosok pendukung yang selalu memberikan semangat dan kekuatan maka individu akkan merasa ada seseorang yang selalu ada pihaknya sehingga individu akan memiliki konsep diri yang positif. Ada juga komponen pembentuk konsep diri yang dikutip dari Utami & Asih (2017) sebagai berikut:

1. Citra tubuh adalah sikap terhadap atribut fisik individu, karakteristik penampilan dan kinerja. Stuart & Sundeen (dalam Ihsani,2015) menyebutkan bahwa sikap ini mencakup persepsi dan perasaan tentang ukuran, bentuk, fungsi penampilan dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu yang secara berkesinambungan dimodifikasi dengan pengalaman baru setiap individu.
2. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana ia harus berperilaku berdasarkan standar, aspirasi, tujuan atau penilaian personal tertentu. Standar dapat berhubungan dengan tipe orang yang diinginkan atau sejumlah aspirasi, cita- cita, nilai-nilai yang ingin dicapai.
3. Harga diri adalah rasa seseorang mengenai dirinya. Rasa ini adalah suatu evaluasi dimana individu mempertahankan dirinya, terhadap merupakan penilaian pribadi hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Frekuensi pencapaian tujuan akan menghasilkan harga diri yang rendah atau tinggi. Jika individu sering gagal maka cenderung harga diri rendah. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain. Aspek utama adalah dicintai dan menerima penghargaan dari orang lain (Stuart & Sundeen dalam Ihsani, 2015).
4. Identitas adalah pengorganisasian prinsip dari kepribadian yang bertanggungjawab terhadap kesatuan, kesinambungan, konsistensi dan keunikan individu. Sedangkan identitas diri adalah sensasi individualitas dan keunikan yang disadari dan secara kontinu muncul sepanjang hidup yang merupakan bagian dari konsep diri.
5. Penampilan peran adalah sekumpulan harapan mengenai bagaimana individu menempati suatu posisi tertentu dari perilaku. Peran adalah serangkaian pola perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu di berbagai kelompok sosial. Peran yang ditetapkan adalah peran di mana seseorang tidak mempunyai pilihan. Peran yang diterima adalah peran yang terpilih atau dipilih oleh individu. Peran adalah sikap atau perilaku nilai serta tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat (Santrock, 2007).

Dari uraian komponen pembentuk konsep diri diatas maka dapat dikatakan pembentuk konsep diri adalah bagaimana kondisi fisik seseorang, selanjutnya bagaimana individu menginginkan seperti apa atau ideal dirinya, adapun harga diri seseorang juga dapat menjadi pembentuk konsep diri dan identitas diri yang dapat dikatakan adanya keunikan dari setiap individu dan terakhir ada penampilan peran yang dimaksudkan keinginan atau harapan dari individu. Semua komponen diatas akan menghasilkan konsep diri positif atau negati tergantung bagaimana individu dan lingkungan sekitar memperlakukan individu tersebut.

### 2.8.3 Aspek-aspek Konsep Diri

 Konsep diri memiliki peranan penting dalam kehidupan, konsep diri dapat mempengaruhi individu dalam menjalankan kehidupannya. Seperti bagaimana dia berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, jika individu memiliki konsep diri yang positif maka individu tersebut dapat berinteraksi dan berhubungan baik dengan lingkungan sosialnya, sebaliknya jika individu memiliki konsep diri yang negatif maka akan berdampak buruk terhadap kehidupannya dan tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan. Ada aspek-aspek yang ada dalam konsep diri, seperti aspek-aspek konsep diri menurut Fitts (1965) yang dikutip dari Ihsan Mz (2018) sebagai berikut:

1. *Physical self,* bagaimana seseorang memandang kesehatan, penampilan, kelebihan, dan kekurangan secara fisik.
2. *Personal self*, bagaimana seseorang memandang dan menilai keberadaaan diri sendiri.
3. *Family self*, bagaimana seseorang memandang dirinya dalam hubungan dengan orang-orang yang sangat dekat dengan dirinya.
4. *Social self,* bagaimana seseorang memandang dirinya dalam hubungan dengan orang lain.
5. *Moral ethical self,* bagaimana gambaran seseorang terhadap hubungannya dengan tuhan dan peraturan-peraturan atau norma-norma hidup yang berlaku.

Menurut uraian diatas maka asepk-aspek yang terdapat dalam konsep diri yaitu bagaimana individu memandang bentuk fisiknya seperti apa penampilan dirinya, kedua bagaimana individu menilai seperti apa keberadaan dirinya sendiri di lingkuang sekitar dia, selanjutnya seperti apa pandangan individu terhadap hubungan dirinya dengan orang-orang terdekatnya seperti keluarga atau sahabatnya. Selanjutnya seperti apa pandangan individu terhadap hubungan atau pembentukan relasi dengan orang-orang disekitarnya seperti lingkungan kerja, dan yang terakhir bagaimana individu memandang atau menilai hubungan dirinya dengan tuhannya ataupun dengan norma, nilai atau kultur yang ada berlaku disekitarnya.